

## KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM

**Djumadi**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: djunaidy1009@gmail.com

### **Abstrak:**

Pembangunan ekonomi perspektif Islam adalah pembangunan manusia secara utuh bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi lebih dari itu adalah pembangunan mental spritual. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi difokuskan pada (a) kemaslahatan umat manusia dari kepunahan; (b) sumber daya manusia (SDM) yang baik, mencerminkan Sumber Pendapatan yang Halal (SPH); (c) menjaga dan memelihara ekosistem alam dari kerusakan; (d) pemanfaatan lahan secara maksimal dan membayar pajak kepada negara. Hasil interpretasi menunjukkan, bahwa pesan al-Qur'an tentang pembangunan ekonomi perspektif Islam belum banyak mendapat perhatian terutama pada negara-negara Islam. Salah satu indikator pembangunan yang dijelaskan adalah tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang melanda berbagai Negara Sedang Berkembang. Beberapa solusi yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) kurangi belanja rutin, dan menambah kuantitas fiskal; (2) pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan dipedesaan; (3) ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan SDM sektor pertanian.

### **Abstract:**

Economic development is the Islamic perspective of human development as a whole not just the physical needs, but more of it is mental development-spiritual. The Islamic view on economic development is focused on (a) the mankind from extinction. (b) Human Resources (HR) good, reflecting Source Revenues Halal (SPH). (c) maintain and preserve natural ecosystems from damage; (d) the maximum utilization of the land and pay taxes to the state. Results show that the interpretation of the message of the Qur'an on the Islamic perspective of economic development has not received much attention, especially in predominantly Muslim countries. One indicator development are described, among others, levels of inequality and poverty that struck various NSB. Some of the solutions that need attention: (1) reduce routine expenditures, and increase the quantity Fiskal; (2) with establishment of economic development aimed at improving the quality of rural areas; (3) The availability of employment and human resource development of agriculture sector.

Keywords: economic development, Islamic perspective

### **Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Dalam konsep al-Qur'an, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim a.s telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan

ekonomi dunia,<sup>1</sup> berlangsung tanpa saling mendahului, itulah makna tawaf “mengelilingi ka’bah” dan ini yang menjadi model dari pembangunan ekonomi dunia ketika semua negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang lainnya, belum bisa merubah kinerja perekonomian yang mengedepankan kemaslahatan bersama (*rahmatan li al-‘ lamîn*).

Secara teori, prinsip memaksimalkan keuntungan versi ekonomi modern,<sup>2</sup> telah melahirkan pelaku ekonomi yang serakah sehingga muncul istilah *homoeconomis* dan *homo homini lupus*, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Akibatnya, dunia tidak pernah sepi dengan masalah. Itulah *self interest* sehingga tidak jarang terjadi pemalsuan, pemerasan, penindasan dan semua perilaku yang tidak manusiawi lainnya. Sebagai *universal benefit*, ekonomi Islam tidak bermaksud secara khusus mengejar kepentingan maksimal semata, melainkan menempatkan martabat manusia sebagai subyek pembangunan ekonomi, bukan obyek pembangunan. Pada konteks ini akhlak pembangunan menempatkan posisi sentral dan merupakan tercermin dari esensi aqidah-spiritual, syari’at yang benar, dan akhlak mulia dan terpuji.

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial-spiritual yang demikian ini seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan saat ini. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam konteks sosio-ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Karena ketidakadilan dapat merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan moralitas. Dalam perspektif Islam, untuk mewujudkan struktur sosial motivasi utamanya didasarkan antara lain pada filsafat moral yang benar.<sup>3</sup> Ajaran Islam tentang pembangunan ekonomi merupakan

---

<sup>1</sup>Lihat antara lain QS Ibrahim (14): 35 yang artinya: ‘ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.’

<sup>2</sup>Penulis menggunakan istilah ekonomi modern bukan ekonomi konvensional bertujuan adalah untuk menghilangkan dikotomi antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sebab jika digunakan istilah konvensional, maka ekonomi Islam dapat dikatakan sistem ekonomi inkonvensional. Meskipun demikian, tujuan dari dua sistem ini adalah sama karena pada hakikatnya manusia selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, dan inilah bumi. Lihat Fahmi Basya, *Bumi itu Al-Qur’an* (Jakarta: Zaytuna Ufuk Abadi, 2013), h. 279.

<sup>3</sup>Istilah moral dan etika seringkali digunakan secara berulang, misalnya moral dan etika, etika dan akhlak atau sebaliknya. Padahal esensi dari ketiga istilah itu sama. Yang membedakan terutama dari sumber ilmunya. Etika bersumber dari pemikiran filsafat, moral bersumber dari pemikiran budaya, dan akhlak bersumber dari Al- Qur’an. Disarankan agar penggunaan istilah ini sesuai dengan kajian dan

bagian dari visi besarnya tentang etika universal. Ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang falid tentang dasar, proses dan motivasi pembangunan ekonomi dalam masyarakat Islami - yang mencerminkan masyarakat atau negara yang ideal - harus didasarkan pada proposisi etik.<sup>4</sup>

Begitu konpeksnya pembangunan menyebabkan hingga saat ini tidak ada satu teori pembangunan yang paling tepat diterapkan bagi semua negara di dunia. Harus diakui bahwa teori-teori pembangunan yang ada, khususnya pada awal perkembangan cabang ilmu ekonomi sangat didomionasi oleh hasil pemikiran para ekonom Barat. Pola pikir dan buah pikiran para ahli tentunya diwarnai oleh tata nilai dan kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Demikian halnya dengan ekonomi Barat yang mencoba memformulasikan strategi pembangunan dalam suatu kerangka teori yang sistimatis, di mana dasar teori yang dihasilkan hanya dapat terpenuhi bila teori itu diterapkan di Barat. Pada banyak kasus, ternyata kurang tepat teori itu diterapkan begitu saja di negara-negara tertinggal dan negara-negara sedang berkembang. Perbedaan tata nilai, sistem sosial, dan kondisi lingkungan antara negara maju umumnya di benua Eropa dan Amerika, dengan negara-negara tertinggal dan negara-negara sedang berkembang yang umumnya terletak di benua Afrika dan Asia, menyebabkan penerapan teori-teori pembangunan yang ada banyak dijumpai “kegagalan.”<sup>5</sup>

Selama dekade 1950-an dan dekade 1960-an tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu Negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) atau *Product Domestik Bruto* (PDB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan social secara lebih merata. Proses tersebut dikenal secara luas sebagai “*prinsip trickle down effect*.” Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni (1) bagaimana konsep pembangunan ekonomi perspektif Islam?; (2) bagaimana prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam?; dan (3) bagaimana komponen makro pembangunan dalam Islam?

---

pemikiran yang dibangun, dan jangan disalah gunakan alis asal- asalan tanpa mengetahui dasar teori keilmuan yang benar.

<sup>4</sup>Penjelasan tentang prilaku etik dalam konsep pembangunan ekonomi diuraikan dalam Ann Marie Sabath, *The Advantage Quest Guide, Business Etiquette* (Malaysia: Printmate Sdn, 2002), h.93.

<sup>5</sup>Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Ed. 5, Cet. 1; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 31.

## **Konsep Pembangunan**

Sebelum menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dalam Islam, ada baiknya dikemukakan beberapa istilah dan teori seputar konsep pembangunan ekonomi. Istilah pembangunan ekonomi adakalanya *pembangunan* saja merupakan istilah yang sudah sering didengar, dan tentunya tidak susah untuk menerangkan artinya. Pada umumnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.<sup>6</sup> Implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Menurut Myrdal pembangunan diartikan sebagai pergerakan ke atas dari seruluh sistem sosial,<sup>7</sup> ada lagi yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatiannya pada kualitas dari proses pembangunan.<sup>8</sup> Selama dasawarsa 1970-an, redefinisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan antara negara-negara sedang berkembang, antar provinsi dan antar kabupaten/kota termasuk di Indonesia.<sup>9</sup> Menurut Seers sebagaimana dikutip Kuncoro dalam evolusi makna pembangunan mengatakan bahwa obsesi Seers memperlihatkan keprihatinannya melihat kenyataan pembangunan di NSB.

Berdasarkan pengertian istilah di atas, setidaknya terdapat empat fungsi utama pemerintah dalam perekonomian suatu negara terutama negara sedang berkembang; *Pertama*, Pembentukan kerangka landasan hukum. Penetapan peraturan dan undang-undang oleh pemerintah sebetulnya merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat, jadi bukan analisis efek biaya menurut pengertian ekonomi; *Kedua*, Penentuan kebijakan stabilitas makro ekonomi, berupaya untuk memuluskan siklus bisnis dengan mencegah atau menekan angka pengangguran dan kemacetan pertumbuhan ekonomi serta menekan inflasi. Untuk itu, diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal; *Ketiga*, mempengaruhi alokasi sumber daya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi. Dari sisi mikro ekonomi dari kebijakan

---

<sup>6</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Cet. 4; Jakarta: Prenada media Group, 2011), h. 3.

<sup>7</sup>Gunnar Myrdal, *Asean Drama* (New York: Pantheon, 1971), h. 23.

<sup>8</sup>Gerald Meier, *Leading Issues in Economic Development* (Ed. 5; New York: Exford University, 1989), h. 1

<sup>9</sup>Dudley Seers, "The Meaning of Development," dalam Charles K Bilber, *The Political Economy of Development and Underdevelopment* (New York: Random House, 1973), h. 43.

pemerintah yang mengatur tentang bagaimana kehidupan perekonomian dilaksanakan, dan *keempat*, menciptakan program pembangunan untuk mempengaruhi distribusi pendapatan secara merata, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar negara maju dan NSB semakin rendah. Itulah sebabnya, perekonomian modern tidak hanya memelihara standar kehidupan minimum bagi masyarakat, tetapi juga melakukan retribusi pendapatan (*input* negara) di antara warganya untuk mewujudkan keadilan.<sup>10</sup>

### **Beberapa Pendapat Seputar Pembangunan Ekonomi**

Ahli sejarah sebetulnya sudah lama mengamati perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia. Beberapa teori lama menekankan pada faktor iklim dan mengatakan bahwa semua negara-negara maju berada pada daerah beriklim sedang. Ada pula yang menekankan bahwa faktor budaya dan agama sebagai penentu utama. Ada pula yang menekankan pada “etika Protestan” sebagai kekuatan yang mendorong orang untuk mencari kemajuan pribadi. Memang, teori itu sedikit banyak memiliki kebenaran, walaupun tidak seluruhnya.<sup>11</sup> Karena itu, jika diamati terdapat benang merah yang menghubungkan antara kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) dengan pembangunan ekonomi (*economic development*).

Untuk membahas berbagai aspek pembangunan ekonomi diperlukan beberapa teori pembangunan sebagai instrumen akademik antara lain Adam Smith, Malthus, Ricardo, John Stuart Mill, dan Karl Marx, secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut.

Adam Smith (1723- 1790) seorang ahli ekonomi klasik dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* terbit tahun 1776. Pembahasan tentang pembangunan setidaknya terdapat tiga pemikiran. *Pertama* dalam dunia nyata, Smith meyakini berlakunya “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Smith menganggap, bahwa setiap individu bebas memenuhi kebutuhannya demi keuntungannya sendiri, dengan bimbingan sebuah kekuatan yang tidak terlihat (*invisible hand*). Smith yakin, bahwa kekuatan pasar akan berjalan dengan sendirinya sehingga melahirkan hukum permintaan dan penawaran; *kedua* Selain pembagian kerja yang merupakan titik awal pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur sebagai jantung penghubung. Pandangan Smith tentang hakikat manusia yang memiliki sifat serakah justru dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.<sup>12</sup> Smith tidak bermaksud mengatakan keserakahan itu identik

---

<sup>10</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 46

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>12</sup>Pandangan Smith dengan Mandeville memiliki konklusi yang berbeda. Menurut Mandeville, sikap rakus manusia akan cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan dapat memberikan dampak

dengan merampas hak orang lain, melainkan motivasi berusaha merupakan kunci keberhasilan; *ketiga* proses pemupukan modal dan pertumbuhan sebagai syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Smith menekankan bahwa pemukiman modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Sebab itu infestasi merupakan syarat utama bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih dahulu menabung dan menanam modal.

David Ricardo (1772-1823) dalam *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Teori Ricardo didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain peran pemilik lahan pertanian, modal, dan tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi.<sup>13</sup> Makanya, penting untuk meningkatkan produksi dan mengurangi konsumsi. Ricardo mengingatkan bahwa lebih banyak menggunakan mesin, berarti memperkerjakan sedikit buruh, akan menjurus pada pengangguran dan menurunkan upah, keadaan ekonomi buruh lebih buruk.

Thomas Robert Malthus (1766-1834) selalu dikaitkan dengan teori kependudukan, dalam *Principle of Political Economy* (1820). Menurutnya, proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya (alamiah). Untuk itu, diperlukan usaha dan konsistensi dipihak rakyat. Malthus menekankan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan negara. Berkaitan dengan semua itu, Malthus melihat bahwa pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya, pertumbuhan penduduk tetap mengikuti deret ukur, sedangkan bahan pangan selalu mengikuti deret hitung. Malthus melihat bahwa pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan tersebut diimbangi dengan permintaan yang efektif – produktif.

Selain persoalan pertumbuhan penduduk, Jhon Stuart Mill (1806-1873) percaya teori Malthus. Pembatasan penduduk merupakan langkah penting. Dia menganjurkan pembatasan kelahiran sebagai lawan pengendalian moral. Berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, Mill sedikit melonggarkan. Mill membolehkan campur tangan pemerintah terutama kebijakan- kebijakan pemerintah yang dapat membawa kearah peningkatan efisiensi dan menciptakan iklim yang lebih baik.

### **Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam.**

---

sosial-ekonomi yang buruk bagi masyarakat. Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h. 26.

<sup>13</sup>Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, h. 50.

Berlangsungnya ekonomi pembangunan dunia ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi *share* sektor perdagangan dan transportasi yang penuh dengan kompetisi dan lokomotifnya yang dibangun adalah lingkaran kapitalis (liberalisme).<sup>14</sup> Sistem ini menjadi populer dengan keyakinan yang kuat dan mendewakan liberalisasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Namun, dalam perjalanannya sistem ini gagal menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan dan hanya menyisahkan ketimpangan yang semakin mendalam antar individu, kelompok, antar sektor perekonomian, antar wilayah bahkan antar negara khususnya negara maju dan NSB (negara sedang berkembang).

Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran berkepanjangan, kemelaratan dan eksploitasi sumber daya alam praktis amat merugikan Negara Sedang Berkembang atau kelompok yang lemah. Karena itu keadilan dan kemakmuran untuk penduduk bumi tidak akan pernah terwujud selama tidak ada perubahan yang mendasar terutama kebebasan pasar sebagai sumber kedaulatan yang mengatur perekonomian dunia. Sementara itu Negara Sedang Berkembang mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari ketidakberdayaan, yang berimplikasi terhadap sumberdaya manusia yang amat rendah, kesejangan sosial, kemiskinan dan pengangguran yang tidak kunjung padam dan luput dari perhatian dunia.<sup>15</sup> Dari 57 negara di dunia yang diukur dengan menggunakan data Tingkat Kenaikan Pendapatan per Kapita dunia,<sup>16</sup> dan indeks Tingkat Konsumsi per Kapita menurut indikator non moneter tahun 1950-1999 menunjukkan perbedaan dan perubahan ketimpangan amat signifikan.<sup>17</sup>

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir) seperti diisyaratkan dalam QS 63: 9-10.<sup>18</sup> Selain ayat tersebut, al-Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim as dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw.<sup>19</sup> Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh

---

<sup>14</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.1

<sup>15</sup>M. Umar Chapra, *Islam dan pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 64.

<sup>16</sup>Agus Maddison, *Monitoring the World Economy*, OECD Paris dalam Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 40.

<sup>17</sup>W. Beckarman, *International Comparison of Real Income*, Development Centre of thr OECD dalam Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 72.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Bandung: SYGMA, 2007), h. 553.

<sup>19</sup>Nabi Ibrahim meletakkan dasar spritual pembangunan manusia sebagaimana diabadikan Allah dalam QS Ibrahim (14). Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h, 255-261.

masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi.

Kebijakan nabi Muhammad saw dapat ditelusuri melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersaudarakan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi nabi saw. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintahan Madinah mulai mengalami perubahan, meskipun terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan itu disebabkan antara lain keterbatasan lahan pertanian dan masalah politik perluasan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur belum mengalami pertumbuhan signifikan, di samping itu gangguan keamanan masyarakat Madinah seringkali memicu terjadinya peperangan.<sup>20</sup>

Kebijakan fiskal yang dilakukan nabi Muhammad saw pada abad ke- 7 M, merupakan model baru dalam bidang keuangan negara. Seluruh kekayaan negara disimpang dan dikeluarkan sesuai kebutuhan.<sup>21</sup> Instrumen kebijakan fiskal dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja (*aggregate demand*) sehingga semua lahan pertanian di Madinah dimanfaatkan maksimum. Sektor pertanian difokuskan pada usaha *muḍarabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, sehingga tidak mengherankan jika penarikan *share* sektor pajak pertanian cukup signifikan misalnya *kharaj*, *khum jizyah*, zakat dan *ghanimah* diserahkan kepada negara atas dasar kesadaran spiritual – iman, dan taqwa.

Dalam Islam, kemiskinan seringkali diakui sebagai nasib yang menimpa, namun tidak berarti membenarkan dan membiarkan diri untuk hidup miskin. Tidak jarang, akibat kemiskinan manusia terjerat dengan berbagai perbuatan dan berakhir dengan kekufuran, dan hal itu sudah diingatkan oleh nabi Muhammad Saw.

Dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil di atasi secara memuaskan, terutama di negara sedang berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, pernah tercatat, bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 hijriah, di bawah pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan secara ekonomi).

Nampaknya sejarah membuktikan, bahwa sebuah negara akan menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, bila pemerintah yang

---

<sup>20</sup>K. Ali, *Sejarah Islam, Tarikh Pramodern* (Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 61 dan 71.

<sup>21</sup>Kadim As-Sadr, *Fiscal Policiesin Aerly Islam*, dalam Euis Amalia, *op.cit.*, h. 78-80.



berkuasa berhati mulia, beriman dan bertakwa dan menerapkan pola hidup sederhana bagi pejabatnya, dengan mengembalikan kekayaan negara (*input*, pendapatan) berimbang bahkan cenderung lebih besar dalam belanja modal kepada rakyat yang dipimpin. Pada sisi lain, pemilik modal menitipkan kekayaan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan umat, dan zakat produktif,<sup>22</sup> infaq dan sadakah. Demikian halnya dengan sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak dioleh dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu contoh negara dunia yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan Islami dengan lima pilar utama yaitu:

1. Penguasa yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros (*iqtisyadi*) demikian juga rakyatnya.
2. Kesadaran dan keikhlasan setiap warganegara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak, wakaf dan sedekah dan penerimanya semakin sedikit karena malu (budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akherat)
3. Mengelola Bazda-Baznas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran, dan jumlah (trasparan, asas manfaat).
4. Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya, dan menghilangkan sifat- sifat pejabat yang rakus (tamak).
5. Pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya.

Implikasi dari lima dasar di atas, jika baik, maka akan berdampak pada pemeliharaan dan perbaikan *maq syid syari'ah* (kemaslahatan manusia). Namun jika tidak baik, maka akan berdampak negatif juga pada *maq syid syari'ah* dan harapan kebahagiaan akherat dipastikan tidak terwujud karena tidak berjumpa dengan tuhan-Nya. Dengan demikian, konsep pembangunan dalam Islam sebetulnya cukup sederhana, karena tidak mengganggu kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif dengan motor menggerakannya “spiritual” karena Allah. Bukan pula seperti kapitalis, sosialis, dan komunis yang mengagung- agungkan kekayaan individu dan mengabaikan kepemilikat kolektif dari sisi manfaat.

### **Prinsip-Prinsip Umum Pembangunan Ekonomi dalam Islam**

---

<sup>22</sup>Paradigma zakat selama ini menggunakan terminologi fitrah (konsumsi lebaran) dan terkesan pasif, dan sulit dirubah menjadi zakat dalam terminologi *annam* , “tumbuh, berkembang, dan berputar pada orang lain. Ini bukti ijthad Umar bin Khatab mampu merubah wajah Madinah menjadi Model Pertanian Modern pada masanya, lalu Umar bin Abdul Azis melanjutkan pada kebijakan pada masa pemerintahannya. Distribusi pendapatan negara hanya pada orang-orang yang tidak bisa bekerja, sisanya tidak diberikan bahkan diberi waktu untuk masing- masing mustahiq mengeluarkan zakat pada tahun berikut, jika tidak diusir dari negaranya sendiri.

Negara yang menganut sistem kapitalis akan memperkuat ekonominya, dengan memungut pajak dan penghasilan lainnya termasuk biaya birokrasi.<sup>23</sup> Islam sebagai agama *rahmat* bagi segenap manusia dan alam akan memperkuat pembangunan ekonominya dengan berbagai usaha dan penghasilan yang halal. Demikian pula dalam penanganan kemiskinan. Pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Khusus pada hal-hal yang belum diperoleh petunjuk pelaksanaannya, maka pemerintah dan pelaku usaha berijtihad dalam koridor aqidah, syari'ah dan akhlak mulia. Karena kaidah pokok adalah "segala usaha manusia menyangkut pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya, hukumnya boleh." Sebab itu, siapapun yang menjadi pelaku pembangunan atau pelaku ekonomi memiliki kebebasan berinovasi dan kreasi sepanjang tidak ada larangan dengan prinsip-prinsip dan landasan antara lain:

### **1. Kepemilikan**

Menurut Aedy, kepemilikan dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam dibagi menjadi tiga macam, yakni:

(1) Kepemilikan Individu.

Kepemilikan individu dihargai dan dihormati semua orang sehingga siapapun merasa aman dan nyaman. Adapun dalam pemanfaatan, melekat pula kewajiban antara lain tidak boleh merugikan orang lain, tidak mendatangkan kemudharatan dan selalu dengan niat ibadah kepada Allah (efek positif terhadap *maq syid al-khamsah*: pemeliharaan agama, nyawa, akal, kekayaan, dan keturunannya). Zakat wajib dikeluarkan jika telah sampai haul dan nisabnya. Bahkan sewaktu-waktu fungsi sosial dari pendapatan dapat diberikan kepada orang tertentu dengan niat ibadah.

(2) Kepemilikan Umum

Al-Qur'an memberi *warning* sebagaimana disebutkan dalam QS 'Abasa (80): 24 'maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.' Dalam menyikapi anugerah Allah, manusia wajib mensyukurinya sebagai pemilik bersama untuk semua. Jika Keynes menghendaki campur tangan pemerintah terhadap perekonomian, tetapi hasil dari pendapatan itu tetap pada otoritas individu, maka dalam Islam campur tangan pemerintah hanyalah dalam bentuk pengendalian dan kebijakan, dan hasilnya sebesar-besarnya diserahkan kepada

---

<sup>23</sup>Beberapa kasus pada negara sedang berkembang termasuk di Asia tenggara, biaya parlemen relatif tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Di Indonesia biaya eksekutif terus menunai kecaman dari segenap warganegara Indonesia, karena selain pendapatan perbulan yang amat menguras uang rakyat, tunjangan pun semakin menggila. Terakhir gedung DPR, bahkan kasur anggota DPR pun terus menunai kecaman dari rakyat. Presiden tidak malu-malu lobi di DPR minta kenaikan gaji pokok. Begitu pula biaya pada pemerintah di berbagai daerah semakin meningkat. Namun, ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat, pejabat yang korup pun mengalami peningkatan yang amat signifikan pula.

masyarakat untuk mendorong peningkatan pembangunan ekonomi sehingga pemeliharaan dan kesenambungan *maq sid al-khamsah* tetap terjaga dari kepunahan.

(3) Kepemilikan Negara

Sumber-sumber pendapatan negara adalah untuk negara. Negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk keperluan keamanan dan ketertiban negara termasuk fasilitas dan infrastruktur lainnya yang menyangkut hajat hidup rakyatnya dari semua kepemilikannya. Siapapun penguasa, ia tidak sekedar menyelenggarakan sistem pemerintahan menurut kehendak rakyatnya, lebih dari itu ia memegang amanah dari toritas pertama “Allah Pencipta langit dan bumi” sebagai khalifah yang adil dan beradab.

## 2. Menghidupkan Tanah Mati

Salah satu ciri Negara Sedang Berkembang dan negara tertinggal (miskin) adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah.<sup>24</sup> Konsep ekonomi Islam terhadap tanah mati (lahan terlantar) menjadi tanggungjawab pemilikinya. Ada dua tanggungjawab. *Pertama*, pemilik lahan dibebankan pada fardhu kifayah, dan bukan fardhu ain. Artinya bahwa pemilik lahan pertanian akan dituntut pada pengadilan Tuhan dan bertanggungjawab terhadap hak kepemilikannya. Sosulinya adalah mencari dan memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk memiliki dan menggarap lahan, sehingga memperoleh manfaat sebesar-besarnya demi kemakmuran bersama (bukan *musaqah* dan *muzara'ah*). *Kedua*, pemilik lahan tidur berkewajiban mengeluarkan zakat (denda) kepada negara disebabkan lahan yang tidak difungsikan. Praktek ini berlangsung pada masa nabi di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sesudahnya.

Jika tidak dilaksanakan kedua opsi tersebut, maka negara dapat mengambil alih, bila pemilikinya tidak mememanfaatkannya dalam jangka panjang. Umar ibn Khattab ra pernah mencontohkan terhadap kasus lahan terlantar dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat Madinah selama tiga tahun berturut-turut menggunakan lahan pertanian terlantar dan tidak diberikan sedikit pun hasil kepada pemilik lahan yang malas.

---

<sup>24</sup>Secara umum, negara sedang berkembang adalah sejumlah negara yang mayoritas beragama Islam seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia tenggara dengan karakter perekonomian “Pertanian”. Dan negara- negara maju seperti Eropa dan Jepang, karakter perekonomian adalah industri. Ini sebetulnya yang mewarnai pemikiran dan teori ekonomi yang amat berbeda dengan tradisi pemikiran ekonomi Islam, demikian halnya dalam bentuk kerjasama. Pada negara- negara maju, teori dan ukuran dari setiap teori didasarkan pada data penelitian (kuantitatif) dalam waktu yang amat panjang, sementara pada tradisi pemikiran ekonomi Islam lebih didasarkan pada makna filosofis (kualitatif), namun kering dari teori dan ukuran yang valid. Lihat Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru I: Memahami Dirkursus Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 130-146.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Liar

Sumber daya liar adalah bagian dari sumber pendapatan masyarakat, karena 4/5 dari bumi ini adalah air dan laut, sehingga sumber daya liar yang paling banyak terdapat di laut dan air. Kedua sumber tersebut dengan segala kekayaan yang terkandung merupakan sumber pendapatan yang layak untuk kesejahteraan rakyat. Dengan tetap menjaga dan memelihara sumber tersebut, sehingga kerusakan darat dan laut dapat diminimalisir sedemikian rupa, untuk kelangsungan dan keseimbangan bumi.

#### **Komponen Makro Pembangunan dalam Islam**

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa persamaan agregat terutama pada sektor Produksi. Sektor produksi makro ekonomi Islam berbeda dengan sektor produksi ekonomi modern. Jika sektor produksi ekonomi modern menitik beratkan pada maksimalisasi pendapatan (kuantitatif) semata, maka makro ekonomi Islam tidak sekedar pada maksimalisasi kualitatif semata, akan tetapi pada aspek kuantitatif menjadi ukuran normatif. Selain itu, pada aspek konsumsi rumah tangga menurut ekonomi modern ditentukan berdasarkan permintaan, namun makro ekonomi Islam justru permintaan ditentukan berdasarkan tingkat kehalalan yang jumlahnya didasarkan pada kebutuhan dan penghematan. Adapun belanja modal, dalam ekonomi modern belanja modal didasarkan pada permintaan, namun dalam berbagai kasus jumlah permintaan itu diselewengkan sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, kota, bahkan antar negara. Dalam makro ekonomi Islam, fiskal didasarkan atas niat ibadah, sehingga pejabat korup jarang ditemukan dan ketimpangan seminimal mungkin dapat dihindari.

Persamaan agregat, pendapatan nasional, menurut teori ekonomi moden antara lain adalah  $Y=C+I+G+X-M$ .

Dimana:

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

X = Pengeluaran pemerintah/ Belanja Modal

M = *Share* sektor Perdagangan luar negeri.

Menurut ekonomi makro Islam *estimase agregat* tersebut adalah:

$$Y = C+I+G+X-M_Z,$$

Dimana:

Y = Produksi Nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

X= Pengeluaran pemerintah/Belanja Modal

M = *Share* sektor Perdagangan Luar Negeri

Z= Sektor Dana Umat: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Hibah, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### 1) Sektor Produksi (Y).

Produksi barang berarti menciptakan manfaat sehingga dapat ditawarkan atau dijual pada orang lain dengan menerima balas jasa dalam bentuk keuntungan. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi modern. Ekonomi modern/kapitalis yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungannya, ekonomi Islam justru memaksimalkan manfaat (*ma lahabah*) dengan keuntungan yang wajar bahkan ada donasi dari pecahan dalam bentuk *sadaqah*. Komsumen dan produsen adalah mitra usaha, dan saling menjaga dan memberi maslah bersama. Dengan kata lain, terdapat keseimbangan kepentingan produsen dan konsumennya karena efek positif dan negatif dari kerjasama itu tetap kembali pada lima asas makro yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ekonomi Islam, hubungan buruh dan majikan bukan seperti hubungan mesin, melainkan hubungan kesejajaran bersama karena memang saling menguntungkan. Upah dan gaji tidak ditetapkan sepihak, melainkan melalui proses tawar-menawar bahkan tidak sedikit menggunakan *khiyar*. Jadi ekonomi Islam tidak ada pemerasan, melainkan penawaran atas dasar *an tar qin minkum* atau *an tar qi baynakum*.

Sistem kapitalis, modal yang dipinjam mendapat keuntungan pengembalian melebihi modal pinjaman, presentase keuntungan pertahun atau persatuan waktu, sedangkan ekonomi Islam modal mendapat balas jasa dalam bentuk keuntungan *muqarabah* atau *murabahah* atau sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tidak ditetapkan sepihak melainkan kesepakatan kedua pihak antara pemilik modal dengan pengusaha.

Untuk faktor produksi tanah, sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang sama dalam hal pemanfaatan, namun berbeda dalam pendapatan. Dalam hal pemanfaatan lahan pertanian, pemilik dianggap memiliki otoritas untuk mengolah dan menjada keserasian sehingga keselamatan alam dapat mengimbangi iklim bumi. Pada kondisi dimana pemilik lahan tidak menggunakan, maka lahan itu dapat dimanfaatkan orang lain selama tiga tahun, atau negara mengambil alih kepemilikannya.

### 2) Sektor Kumsumsi Rumah tangga (C)

Pada dasarnya, setiap orang adalah konsumen. Dalam kerangka ini, ekonomi Islam mengambil posisi di tengah, artinya konsumen memenuhi kebutuhannya, sepanjang barangnya halal dan digunakan tidak berlebihan. Dalam pandangan ekonomi modern, konsumen dituntut pemenuhan kebutuhan maksimum atau berlebihan, tanpa legalitas halal. Dengan demikian ada jurang terjal yang membedakan antara konsumsi versi ekonomi Islam dan konsumsi versi ekonomi modern.

Demikian pula terhadap makanan dan minuman yang dapat merusak kemaslahatan pribadi atau masyarakat seperti minuman keras, narkoba dan sebagainya. Ekonomi Islam tidak membolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat darurat yang tidak terhindarkan lagi, dan pintu kebolehan hanya terbuka sebatas waktu dan tempat yang amat ketat. Hal itu berarti ekonomi Islam mempunyai jangkauan universal dan tidak terbatas hanya kepentingan dunia semata.

Keserakahan sebagai wujud iblis dan falsafah materialisme. Memang bertentangan dengan falsafah moral ekonomi Islam dan sebagai lawannya adalah hidup sederhana dan tidak boros dan juga tidak kikir sebagaimana digambarkan dalam QS F thir (35): 32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ  
بِالْخَيْرَاتِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

‘Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.’

Hidup ekonomis atau hemat adalah bagian dari substansi moral ekonomi Islam yang menjadi salah satu titik temu dengan ekonomi modern. Namun dengan analisis lebih tajam ekonomi Islam masih lebih unggul dari ekonomi modern karena ekonomi Islam memahami penghematan secara universal tidak hanya bersifat individu dan kering dari nuansa moral kemanusiaan.

### 3). Sektor Investasi

Ekonomi modern membentuk modal dengan tiga cara, yaitu *pertama* melalui tabungan pihak ketiga; *kedua* melalui penjualan surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi, dan *ketiga* melalui pinjaman luar negeri dalam jangka panjang dengan tingkat suku bunga relatif rendah.

Ekonomi Islam menaruh perhatian terhadap pendapatan masyarakat dialokasikan sekurang-kurangnya untuk dua sektor pengeluaran yaitu konsumsi dan tabungan. Dalam hal tabungan dengan asumsi berjaga-jaga dari stagnasi ekonomi, terdapat persamaan dengan pandangan ekonomi modern, namun makna filosofisnya berbeda. Jika ekonomi modern memandang infestasi merupakan menara gading yang dapat menunjukkan tingkat pendapatan negara, maka dalam pandangan ekonomi Islam, penghematan melalui simpanan tunai itu adalah ibadah karena terhidar dari sifat pemborosan. Dalam hal permintaan dan penawaran pinjaman, secara sederhana terdapat kesamaan yang amat signifikan. Karena hukum pasar tetap sulit dihindari dan berlaku secara universal, namun perbedaannya terletak pada niat (*ta'awun*).

## **Kesimpulan**

1. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang amat besar dan telah dicontohkan oleh nabi dan rasul dan kemudian dirangkum oleh Rasulullah saw dengan agenda ilahi “akhlak ekonomi” Qurani menghujam ke bumi dan menyinari qalb manusia melalui itulah konsep “rahmatan li al’al mîn.
2. Prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih mendapat perhatian pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sebagai agama pembawa rahmat dan keselamatan, Islam menghargai hak kepemilikan. Karena itu pembangunan ekonomi bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan atau kekayaan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah.
3. Komponen makro ekonomi Islam memandang penting adanya keseimbangan anggaran rutin dan anggaran belanja modal. Anggaran belanja modal akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja sehingga *maq id al-syarî’at* tetap terpelihara dari kepunahan manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ali, K. *Sejarah Islam, Tarikh Pramodern*, Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Amalia, Euis. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Basya, Fahmi. *Bumi itu Al-Qur’an*, Jakarta: Zaytuna Ufuk Abadi, 2013.
- al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru I: Memahami Dirkursus Al-Qur’an*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: SYGMA, 2007
- Esmara, Hendra. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek*, Jakarta: Gramedia, 1986.

- Gunder Frank, Andre. *Sociology of Development and Under Development of sociology*. Terj. Arif Budiman, *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Pustaka Pulsar, 1984.
- Kuncoro, Mudrajad. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, Ed. 5, Cet. 1; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Meier, Gerald. *Leading Issues in Economic Development*, Ed. 5; New York, Exford University, 1989.
- Myrdal, Gunnar. *Asean Drama*, New York, Pantheon, 1971.
- Sabath, Ann Marie. *The Advantage Quest Guide, Business Etiquette*, Malaysia, Printmate Sdn, 2002.
- Seers, Dudley. "The Meaning of Development." Dalam Charies K Bilber, *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, New York: Random House, 1973.
- Sukirno, Sudono. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Cet. 4; Jakarta: Prenada media Group, 2011.
- Supriatna, Tjahya. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Todaro, Mickael P. *Economic Development in the World, 4th Edition*, New York and Nondon, 1991.
- Waidl, Abdul dan Yuna Farhan. *Anggaran Pro-Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat*, Jakarta: Prakarsa, 2002.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.